

Demo

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus
dari Universitas Monash, Australia



Demonstrasi, disingkat demo, menjadi bagian penting di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Setidaknya ini berlaku untuk kelas terpelajar urban. Mungkin tidak berlebihan jika demo dikatakan sebagai salah satu budaya Indonesia. Betapa malang jika Anda pernah muda, jadi mahasiswa di negeri ini, tetapi tidak pernah ikut demo. Tidak aneh jika pemerintah di negeri ini sering didemo. Tak peduli macam apa pun pemerintah itu. Tak peduli siapa sosok yang kebetulan sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Bagi sebagian besar orang, demo bukan kegiatan mudah atau murah. Apalagi mengorganisasi demo besar-besaran dan bersambung lebih dari sehari. Kalau tidak terdesak, putus asa, atau kondisi darurat, sebagian besar orang tidak suka berdemo. Lain ceritanya jika demo disponsori pihak berkuasa, entah pemerintah atau lembaga swasta.

Jika penguasa mampu menahan emosi, pasukan anti-huru-hara tak perlu membubarkan demo yang berjalan damai. Penguasa bisa memilih diam tanpa harus melayani tuntutan para pendemo sampai para pendemo kehabisan tenaga sendiri. Namun, jika pendemo punya sumber daya dan dana yang memungkinkan protes maraton berjangka panjang, dibutuhkan strategi lain.

Pemerintahan Orde Baru pernah kewalahan menghadapi gelombang demo antipemerintah. Berbagai represi kekerasan tidak membuat aktivis jadi gentar. Represi diganti dengan aneka prosedur perizinan. Istilah demo diganti dengan "unjuk rasa". Namun, gelombang demo antikemampuan tidak kunjung reda.

Pada awal dekade 1990-an, pemerintahan Orde Baru menemukan strategi lain. Mereka mem sponsori demo tandingan terhadap demo antipemerintahan Orde Baru. Dalam waktu singkat, demo tandingan menjadi tren baru dalam sejarah Indonesia. Sampai-sampai penguasa lembaga nonpemerintahan ikut membina demo tandingan bila kewalahan menghadapi protes warganya

(Bersambung ke him 15 kol 1-2)

Demo

(Sambungan dari halaman 1)

berbentuk demo. Siasat ini dipelihara terus oleh penguasa pasca-Orde Baru hingga kini.

Demo menandakan macetnya mekanisme komunikasi resmi dan terlembaga untuk mengatasi perselisihan. Pertentangan kepentingan wajar dan bisa menyehatkan jika diselesaikan secara beradab. Tidak harus lewat demo. Dalam demokrasi yang sehat, pertentangan itu terjadi dalam bentuk debat seru di parlemen di antara partai politik yang saling bersaing. Masing-masing mewakili kepentingan masyarakat yang majemuk.

Tragis jika partai-partai politik memilih berselingkuh dalam persekutuan yang disebut koalisi. Kepentingan masyarakat rentan tidak terwakili di lembaga tinggi negara. Bila kepentingannya tertindas ekstrem, mereka

terpaksa turun ke jalan untuk berdemo walau tenaganya terbatas. Jika demo menjadi norma dan praktik sehari-hari, jangan-jangan ada masalah kronis dalam kehidupan bangsa itu.

Sikap represif terhadap demo sering dikaitkan dengan watak otoriter Orde Baru di masa lampau. Memang Orde Baru tidak punya toleransi pada kritik dan protes terhadapnya. Namun, mereka tidak antidemo. Kebangkitan Orde Baru diawali dengan demo besar-besaran anti-Sukarno dan antipolitik kiri. Terutama sesudah Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Maka, selintas kelihatan aneh jika ada pejabat Indonesia masa kini yang alergi pada kegiatan demo. Lebih absurd jika para pejabat itu dulu mantan demonstran. Namun, semua itu tidak aneh jika dipahami akar masalahnya hingga ke awal kebangkitan rezim Orde Baru.

Dengan mempertimbangkan warisan sejarah, kita bisa maklum atas rendahnya toleransi pejabat mutakhir terhadap berbagai aksi demo yang memprotes kebijakan pemerintah. Mereka terbiasa menuding demo itu dibayar pihak lain. Atau melempar tuduhan para pemrotes itu antek asing. Mereka juga menyebarkan kepanikan kepada publik, seakan-akan demo akan menyulut kerusuhan dan kekerasan.

Sikap yang lazim itu tidak datang tiba-tiba. Ia punya sejarah panjang. Menghadapi gelombang demo antipemerintah, para pejabat pasca-Orde Baru tampaknya sedang berdiri di depan cermin. Mereka menyaksikan kehadiran sosok arwah leluhurnya sendiri, yakni Orde Baru. Untuk jelasnya, dan demi adilnya, berikut ini kutipan langsung kesaksian dari dua tokoh pendukung Orde Baru di awal kebangkitannya. Kutipan ini bersumber dari laporan majalah *Tempo* (15/3/1986).

Yang pertama kesaksian Alamsyah Ratu Perwiranegara (Asisten VII Menpangad).

"Pak Harto memanggil Front Pancasila. Ternyata pagi hari itu juga [12 Maret 1966], banyak demonstran di jalan-jalan. Apakah Pak Harto yang menyuruh demonstrasi itu? Saya tak tahu pasti. Tapi saya bersyukur, dan senang, adanya pasukan liar yang bikin Soekarno panik. Saya sampai memberikan jam Rolex emas kepada Sarwo Eddie dan Kemal Idris. Ya, istilah kampungnya kaulan".

Kesaksian Frans Seda (Menteri Perkebunan) tidak kalah seru.

"Soeharto mengatur strategi, bahwa untuk menghadapi sidang kabinet 11 Maret, mesti ada gerakan. Soeharto memutuskan agar ada demonstrasi mahasiswa. Dan, untuk melindungi para mahasiswa itu, perlu didukung pasukan tanpa tanda pangkat dan simbol lainnya".

"Menurut Pak Harto waktu itu, pasukan itu akan membuat panik Presiden dan menteri-menterinya. Karenanya, Soeharto tak perlu hadir pada sidang kabinet itu. ...Dan benar, sidang kabinet 11 Maret 1966 itu kacau... Saya sendiri, pada 10 Oktober 1965, menyerahkan uang Rp 350 juta pada Pak Harto. Sayalah yang pertama memberikan bantuan, dan diterima sendiri oleh Pak Harto di Kostrad, Jalan Merdeka Timur. Itu uang departemen yang saya pimpin, untuk dipakai biaya operasi tentara".

Kedua kutipan di atas hanya sepercik penegasan betapa pentingnya demo bagi sejumlah pihak dengan kepentingan yang saling bertolak belakang. Demo jalanan menjadi bagian penting dari budaya nasional untuk sebuah bangsa yang majemuk ini. Karena gagalnya perwakilan rakyat dan hampunya debat politik di parlemen.

Kita sama-sama maklum, demo jalanan anti-Sukarno dan antikiri didukung bukan hanya oleh militer dalam negeri. Sejumlah negara asing dari Blok Barat dalam Perang Dingin abad lalu mendukung besar-besaran militer Indonesia. Presiden Sukarno menyebutnya "antek-antek neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme" (nekolim).